

Peran Strategis Indonesia dalam Meningkatkan Keamanan Maritim di Kawasan Asia Tenggara

Qhirani Aulia Rahman Latunrung^{1*}, Imam Fadhil Nugraha²

¹⁻²Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan No.KM.10, Tamalanrea Indah, Kec.Tamalanrea, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan 90245

Korespondensi penulis: qiraniaulia24505@gmail.com*

Abstract. *Maritime security is a strategic issue in Southeast Asia due to the high dependence of ASEAN countries on sea lanes for trade and regional stability. This study aims to analyze Indonesia's role in strengthening maritime security cooperation in ASEAN. The methods used are literature studies and analysis of policy documents related to ASEAN maritime cooperation and national maritime policies. The results of the study show that Indonesia is active in various regional forums such as the ASEAN Maritime Forum (AMF) and the Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF), and carries the Global Maritime Fulcrum (GMF) initiative. Despite challenges such as overlapping institutional authority and limited resources, Indonesia continues to demonstrate a strong commitment to promoting maritime diplomacy, strengthening governance, and handling issues such as IUU Fishing and the South China Sea conflict. The implications of this cooperation are increased regional stability and strengthening ASEAN's position in facing the geopolitical dynamics of the Indo-Pacific.*

Keywords: ASEAN, Indonesia, Maritime Security, Regional Cooperation, World Maritime Axis

Abstrak. Keamanan maritim merupakan isu strategis di Asia Tenggara karena tingginya ketergantungan negara-negara ASEAN terhadap jalur laut untuk perdagangan dan stabilitas regional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Indonesia dalam memperkuat kerja sama keamanan maritim di ASEAN. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis dokumen kebijakan terkait kerja sama maritim ASEAN dan kebijakan maritim nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia aktif dalam berbagai forum regional seperti *ASEAN Maritime Forum* (AMF) dan *Expanded ASEAN Maritime Forum* (EAMF), serta mengusung inisiatif *Global Maritime Fulcrum* (GMF). Meskipun terdapat tantangan seperti tumpang tindih kewenangan lembaga dan keterbatasan sumber daya, Indonesia tetap menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong diplomasi maritim, penguatan tata kelola, dan penanganan isu-isu seperti *IUU Fishing* dan konflik Laut Cina Selatan. Implikasi dari kerja sama ini adalah peningkatan stabilitas kawasan serta penguatan posisi ASEAN dalam menghadapi dinamika geopolitik Indo-Pasifik.

Kata kunci: ASEAN, Indonesia, Keamanan Maritim, Kerja sama Regional, Poros Maritim Dunia

1. LATAR BELAKANG

Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan, Indonesia memiliki posisi yang sangat penting dalam mendukung penguatan kerja sama di bidang keamanan dan pertahanan maritim ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*), khususnya dalam hal memperluas kolaborasi dan integrasi regional. Letak geografis Indonesia yang berada di jalur strategis pelayaran internasional menjadikannya aktor utama dalam dinamika maritim kawasan. Posisi ini secara otomatis menempatkan Indonesia sebagai pusat pengaruh dan penjaga stabilitas maritim. Selain itu, kawasan Asia Tenggara memiliki nilai strategis yang tinggi karena menyimpan berbagai kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan yang saling terkait.

Berbagai kepentingan strategis di wilayah maritim mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk membentuk inisiatif kerja sama keamanan kolektif di sektor kelautan. Walaupun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, kehadiran forum-forum dan mekanisme kerja ASEAN yang berfokus pada isu maritim mencerminkan adanya kesungguhan dalam memperkuat kerja sama tersebut. Jika setiap negara menangani tantangan maritim secara terpisah, maka respons yang dihasilkan tidak akan optimal, mengingat laut merupakan ruang lintas batas negara yang permasalahannya bersifat transnasional. Oleh karena itu, sinergi antarnegara menjadi krusial dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan secara berkelanjutan.

Berbagai ancaman dan rintangan yang dihadapi dapat menegaskan urgensi kerja sama yang solid antarnegara ASEAN dalam menghadapi tantangan maritim. Dalam menghadapi ancaman konflik maritim yang dapat terjadi, maka dibutuhkan pembentukan keamanan maritim dalam kawasan ASEAN. Dengan demikian, kerjasama maritim antarnegara ASEAN menjadi kunci untuk menghadapi tantangan konflik tersebut. Sebagai bagian dari keanggotaan ASEAN, Indonesia memikul peran krusial dalam mendukung terciptanya stabilitas dan keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara. Jika Indonesia berhasil memastikan keamanan maritim di wilayahnya sendiri, maka hal tersebut akan memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap keamanan maritim di tingkat regional. Oleh karena itu, peran strategis Indonesia dalam mendorong kebijakan serta memperkuat kerja sama regional menjadi elemen kunci dalam mewujudkan kawasan maritim yang aman dan stabil.

Di sisi lain, tu mengenai posisi Indonesia dalam konteks ini lebih banyak membahas inisiatif seperti Poros Maritim Dunia (*Global Maritime Fulcrum*) dari sisi kebijakan domestik, namun belum banyak yang mengeksplorasi bagaimana peran Indonesia yang signifikan dalam forum kerja sama maritim ASEAN. Melalui visi presiden Joko Widodo dalam GMF, menempatkan Indonesia sebagai pusat maritim global melalui berbagai inisiatif yang memperkuat persepsi ASEAN terhadap Indonesia sebagai pemimpin strategis yang mampu mendorong stabilitas dan solidaritas kawasan (Auliya & Sulaiman, 2019, p. 80). Meskipun terkendala, GMF mengukuhkan identitas Indonesia sebagai aktor yang mampu memanfaatkan keunggulan geografisnya, yang dapat memenuhi harapan sebagai penyeimbang netral dalam dinamika geopolitik Indo-Pasifik.

Lebih lanjut, tulisan ini akan membahas mengenai peran strategis Indonesia berdasarkan latar belakang tersebut. Selain itu, tulisan ini juga bermaksud memahami dinamika peran Indonesia dalam menengahi dua kekuatan besar yakni Amerika Serikat dan Tiongkok. Tulisan ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam memahami posisi strategis Indonesia

sebagai kekuatan regional dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas kawasan melalui kerja sama maritim.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori peran merupakan salah satu pendekatan dalam studi kebijakan luar negeri yang menekankan pentingnya memahami bagaimana suatu negara membentuk dan menginterpretasikan perannya di kancah internasional. Dalam teori ini, peran negara tidak dipandang sebagai sesuatu yang bersifat tetap atau alami, melainkan sebagai hasil dari proses sosial dan politik yang melibatkan berbagai aktor internal. Lembaga-lembaga negara, tokoh politik, serta pembuat kebijakan memainkan peran penting dalam merumuskan identitas peran nasional. Proses ini sangat dipengaruhi oleh kondisi material negara, seperti tingkat kemajuan ekonomi dan kemampuan militer, serta oleh pandangan ideologis yang dianut oleh para pemimpin dan elit politik. Melalui perpaduan antara realitas domestik dan persepsi internal inilah, negara membangun pemahamannya mengenai posisi dan tanggung jawabnya dalam sistem internasional. (Ishiyama & et.al, 2021, pp. 353-357).

Teori peran dapat digunakan untuk memahami beragam kepentingan dan tindakan para aktor dalam bidang maritim. Teori ini juga memberikan kerangka untuk melihat bagaimana peran-peran tersebut dapat mendukung atau justru menjadi penghambat dalam upaya mencapai tujuan keamanan maritim. Relevansi dari perspektif ini menekankan bagaimana posisi Indonesia dalam membentuk perannya sebagai pemimpin dalam kawasan dan juga dalam kerangka kerjasama maritim ASEAN. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Indonesia turut aktif dalam peran-peran tertentu dalam memanfaatkan posisi geografisnya dan dalam dimensi kebijakan politik luar negerinya, termasuk sebagai penyeimbang dalam dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik.

3. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode naratif deskriptif. Tulisan ini merupakan metode yang digunakan dalam memahami pengalaman individu melalui sudut pandang mereka sendiri (Parks, 2023, pp. 58-60) dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Desain tulisan ini difokuskan pada pengumpulan dan analisis data sekunder berupa dokumen kebijakan, publikasi akademik, laporan resmi ASEAN, pernyataan pemerintah Indonesia, serta dokumen forum regional terkait kerja sama maritim. Tulisan ini bersifat teoritis, di mana populasi terdiri atas dokumen dan kebijakan yang relevan mengenai keamanan maritim di Asia Tenggara, khususnya yang melibatkan Indonesia dalam kerangka ASEAN. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data dilakukan melalui telaah pustaka dengan cara menelusuri

literatur dari jurnal ilmiah, buku, kebijakan nasional dan regional, serta data resmi dari lembaga seperti Kementerian Luar Negeri RI dan Sekretariat ASEAN. Instrumen utama dalam pengumpulan data adalah panduan studi dokumen, yang disusun untuk menyesuaikan fokus pada peran, kebijakan, dan partisipasi Indonesia di forum-forum maritim. Data yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis dengan teknik interpretatif untuk memperoleh pemahaman mendalam atas strategi dan kontribusi Indonesia dalam diplomasi maritim regional.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Wilayah laut di Asia Tenggara memiliki arti strategis yang tinggi bagi negara-negara di sekitarnya, khususnya dalam bidang ekonomi, konektivitas komunikasi, dan lalu lintas pelayaran. Negara-negara anggota ASEAN turut memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan maritim secara global. Namun, kawasan ini juga kerap menjadi sumber munculnya potensi konflik serta beragam ancaman terhadap keamanan laut, baik yang bersifat tradisional maupun non-tradisional. Ancaman terhadap keamanan laut tidak mengenal batas wilayah negara, sehingga penanganannya harus dilakukan melalui kerja sama di tingkat internasional.

Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran strategis dalam memperkuat kerja sama keamanan maupun pertahanan maritim di wilayah ASEAN, utamanya dalam mendorong peningkatan kolaborasi dan kerjasama regional. Indonesia secara tidak langsung telah ditempatkan dalam posisi kunci untuk keamanan dan pengaruh maritim. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki posisis strategis dalam perairan Indonesia Hal tersebut didukung oleh lokasi geografisnya yang strategis dalam perairan Internasional dan juga sebagai bagian dari wilayah jalur perdagangan internasional. Indonesia mempunyai kepentingan strategis dalam melaksanakan kepentingannya yang terkait dengan sektor keamanan maritim, bukan hanya di wilayah perairan nasional, tetapi juga di perairan internasional. Hal ini dikarenakan wilayah perairan, wilayah perairan tersebut mencakup wilayah eko-strategis sebagai salah satu jalur utama perdagangan internasional.

Isu keamanan maritim kemudian menjadi topik penting untuk dimasukkan dalam agenda utama dalam pembahasan regional, utamanya di wilayah Asia Tenggara. Akan tetapi, implementasi maupun penerapannya seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan. Seperti contohnya: masih banyaknya pembajakan laut, degradasi lingkungan, perampokan dan kejahatan transnasional lainnya yang memiliki relevansi dengan isu maritim. Berkaitan dengan hal tersebut, hal ini menuntut kesediaan negara untuk melakukan kerjasama ditingkat regional

dalam menanggulangi permasalahan tersebut dengan tujuan untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan.

Jika dilihat dalam konteks geopolitik, Kawasan Asia-Pasifik berada dalam posisi kompleks, dikarenakan terdapat dua kekuatan besar yang saling berupaya untuk menekankan pengaruhnya di kawasan tersebut, yakni Tiongkok dan Amerika Serikat. Secara ekonomi, kedua negara tersebut memiliki basis perekonomian yang cukup memadai dan secara militer, keduanya memiliki kapabilitas militer konvensional yang cukup canggih. Hadirnya kedua negara tersebut, maka menempatkan posisi kawasan Indo-Pasifik sebagai “arena” persaingan dari kedua negara tersebut, sehingga mengharuskan negara-negara kawasan beradaptasi terhadap persaingan tersebut. Sebagai negara yang memiliki peran besar, Indonesia dapat menjadi kunci sebagai penyeimbang kawasan melalui kerangka kebijakan luar negerinya yang bebas aktif.

Terdapat berbagai kepentingan strategis yang terkandung dalam wilayah maritim Asia Tenggara. Akibat dari kepentingan tersebut, akhirnya mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk menginisiasi kerja sama keamanan kolektif di sektor maritim. Meskipun implementasinya belum sepenuhnya terealisasi, pembentukan forum-forum dan sejumlah mekanisme kerja ASEAN yang berfokus pada isu keamanan maritim menunjukkan adanya komitmen menuju penguatan kerja sama di bidang tersebut.

Tantangan Keamanan Maritim di Kawasan

Keamanan maritim memiliki peran vital dalam menjaga kedaulatan, stabilitas ekonomi, dan kelestarian lingkungan, khususnya bagi negara kepulauan seperti Indonesia dengan wilayah perairan yang luas. Pertama, keamanan maritim melindungi perairan nasional dari ancaman eksternal, seperti pelanggaran wilayah atau konflik militer, untuk mempertahankan integritas teritorial. Kedua, sektor maritim, mencakup perikanan, transportasi laut, dan sumber daya energi, menjadi pilar ekonomi bagi masyarakat pesisir dan negara; ancaman seperti pembajakan atau penangkapan ikan ilegal dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Ketiga, keamanan maritim mendukung pelestarian ekosistem laut yang rentan terhadap polusi dan eksploitasi berlebihan, yang berisiko merusak biodiversitas dan keberlanjutan sumber daya alam (Guricci & Seniwati, 2024, pp. 130-139).

Dengan maraknya ancaman non-tradisional, keamanan maritim menjadi kunci untuk memastikan stabilitas sosial dan keamanan regional melalui kolaborasi antarnegara. Oleh karena itu, keamanan maritim bukan hanya kebutuhan strategis, melainkan juga landasan bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sejalan dengan hal ini (Febrica, 2017, p. 3) menjelaskan bahwa berdasarkan berbagai sumber resmi dan pandangan para ahli, terdapat

empat bentuk ancaman utama dalam konteks maritim Indonesia, yaitu penangkapan ikan ilegal, migran ilegal, permasalahan perbatasan laut, dan penyelundupan. Dalam jalur transportasi dan perdagangan internasional, kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang strategis dan krusial karena kawasan tersebut memiliki cakupan area yang luas. Dalam sektor ekonomi, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya transaksi dagang dan potensi ekonomi dalam kawasan tersebut yang diperkirakan mencapai sekitar 5,3 Triliun USD (Kusuma & dkk., 2021, pp. 77-100). Namun, terdapat beberapa tantangan dalam upaya untuk mencapai kebutuhan strategis tersebut.

Dalam sektor maritim misalnya, kawasan tersebut selain memiliki kepentingan yang strategis, terdapat kepentingan-kepentingan negara besar yang memiliki rivalitas geopolitik didalamnya seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Kondisi ini dapat menimbulkan eskalasi konflik yang ada di kawasan tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dilihat bagaimana peran Indonesia di kawasan yang menjadi stabilisator dalam upaya menjaga stabilitas keamanan kawasan, sehingga diperlukan langkah kerjasama yang lebih eksplisit dan strategis dalam upaya meningkatkan keamanan maritim kawasan. Akibat dari banyaknya tantangan yang dihadapi, telah menjadi kewajiban untuk membangun keamanan maritim melalui pendekatan diplomasi maritim antarnegara di kawasan ASEAN. Diplomasi maritim merupakan strategi dalam hubungan internasional yang memanfaatkan kekuatan dan infrastruktur kelautan seperti kapal militer, penjaga pantai, pelabuhan, dan fasilitas laut lainnya untuk mencapai tujuan diplomatik.

Pendekatan ini tidak hanya terbatas pada upaya penyelesaian konflik atau sengketa batas laut, tetapi juga mencakup upaya memperkuat kerja sama global di bidang keamanan, perdagangan, serta pengelolaan sumber daya kelautan. Berbeda dengan pendekatan hukum laut internasional yang lebih menitikberatkan pada aspek normatif melalui penerapan aturan dan regulasi formal, diplomasi maritim lebih menonjolkan pentingnya dialog, negosiasi, dan kolaborasi multilateral sebagai sarana untuk mencapai penyelesaian yang damai (Hadiningrat, 2020, p. 105).

a) Inisiatif ASEAN Dalam Menangani Masalah Keamanan Maritim

ASEAN telah merumuskan berbagai langkah strategis guna merespons tantangan keamanan maritim yang bersifat tradisional maupun non-tradisional di kawasan Asia Tenggara. Salah satu langkah penting adalah pendirian Komunitas Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community/ASC*), yang dicanangkan melalui Deklarasi ASEAN Concord II pada tahun 2003 di Bali. Deklarasi ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan kolektif yang menyeluruh, terpadu, dan regional dalam menangani isu-isu maritim lintas negara. Kerja sama

yang dibangun di antara negara-negara anggota ASEAN diharapkan dapat mendukung pembentukan komunitas keamanan kawasan yang stabil dan damai.

Sebagai bagian dari penguatan kerja sama maritim, ASEAN membentuk *ASEAN Maritime Forum* (AMF) pada tahun 2010 sebagai ruang dialog lintas sektor yang membahas isu-isu kelautan secara menyeluruh. Forum ini memungkinkan koordinasi antar lembaga dan negara anggota untuk mengatasi tantangan maritim serta menyampaikan hasil diskusinya kepada forum-forum tingkat lebih tinggi seperti *Senior Officials Meeting* (SOM). Di samping AMF, ASEAN juga menyelenggarakan forum lain seperti *Expanded ASEAN Maritime Forum* (EAMF), yang melibatkan partisipasi negara mitra luar ASEAN. Forum ini memperluas jangkauan kolaborasi dalam sektor maritim, mempererat kerja sama kawasan, dan memperkuat solidaritas dalam menghadapi tantangan kompleks di bidang keamanan laut.

Walaupun Indonesia menjalin kerja sama militer bilateral dengan Amerika Serikat maupun Tiongkok, Indonesia secara konsisten menolak keterlibatan dalam aliansi atau blok militer yang bersifat formal. Sebagai gantinya, Indonesia lebih memilih untuk memperkuat jalur diplomasi melalui mekanisme regional seperti ASEAN. Dalam kapasitasnya sebagai salah satu aktor utama di ASEAN, Indonesia menunjukkan komitmen untuk mempertahankan peran sentral ASEAN dalam arsitektur keamanan kawasan serta menjaga agar Asia Tenggara tetap terbebas dari pengaruh dominan kekuatan besar luar kawasan. Melalui inisiatif ini, terlihat jelas bahwa Indonesia memainkan peran strategis dalam menjaga independensi ASEAN agar tidak terpengaruh oleh dominasi dua kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok.

Rangkaian inisiatif ini menunjukkan komitmen kuat ASEAN dalam membangun kawasan yang damai, aman, dan stabil melalui kerja sama maritim yang erat, terencana, dan berkesinambungan. Dalam konteks ini, Indonesia berperan aktif sebagai motor penggerak kerja sama maritim ASEAN melalui diplomasi inisiatif yang berorientasi pada perdamaian dan kesejahteraan bersama.

Inisiatif *Global Maritime Fulcrum* (GMF)

Posisi wilayah Indonesia memiliki letak geografis yang unik disamping letak kepulauan Indonesia yang berada pada garis khatulistiwa, juga posisi geografis ini menurut kenyataannya adalah Negara kepulauan yang berada pada posisi silang dunia, diantara dua benua yaitu benua Asia-Australia dan diantara dua samudra yaitu samudra Hindia-Pasifik. Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara. Sebagai respons, berbagai inisiatif telah dikembangkan, termasuk di antaranya peluncuran konsep *Global Maritime Fulcrum* (GMF) oleh Presiden Joko Widodo.

Inisiatif ini bertujuan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Melalui GMF, pemerintah berupaya menyatukan lebih dari dua puluh regulasi yang ada guna memperkuat sinergi dalam pengamanan wilayah laut, dengan Badan Keamanan Laut Indonesia (BAKAMLA) sebagai lembaga utama yang memimpin koordinasi tersebut. Berikut ini penjelasan mengenai kebijakan GMF sebagai kerangka Indonesia untuk memimpin sektor maritim kawasan. Sebagai kebijakan strategis yang dirancang untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, *Global Maritime Fulcrum* (GMF) tidak hanya bertujuan untuk memperkuat infrastruktur kelautan dan keamanan maritim nasional, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk identitas politik Indonesia di kancah regional dan global. GMF memproyeksikan citra Indonesia sebagai aktor maritim yang aktif, netral, dan bertanggung jawab, serta mampu memanfaatkan keunggulan geografis dan historisnya sebagai negara kepulauan yang besar.

Melalui GMF, Indonesia membingkai dirinya sebagai pemimpin regional yang mengedepankan prinsip kerja sama, stabilitas kawasan, dan penyeimbang strategis di tengah rivalitas kekuatan besar. Dengan demikian, GMF bukan sekadar kebijakan teknokratis, melainkan juga representasi dari narasi peran Indonesia sebagai pemimpin kawasan regional yang ingin dikenali oleh komunitas internasional, khususnya regional ASEAN. Narasi peran ini memperkuat legitimasi kepemimpinan Indonesia dalam forum-forum maritim regional, serta menunjukkan bagaimana identitas nasional dapat dikonstruksi melalui kebijakan luar negeri yang reflektif terhadap kepentingan domestik dan geopolitik kawasan.

Visi dan Langkah Strategis *Global Maritime Fulcrum* (GMF)

Sebagai negara yang turut mendirikan ASEAN, Indonesia senantiasa menitikberatkan kebijakan luar negerinya pada upaya memperkuat kontribusi dan kepemimpinannya dalam menjalin kerja sama di kawasan, terutama dalam kerangka ASEAN.. Sejalan dengan tujuan tersebut, pada awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, ia mencanangkan kebijakan luar negeri yang berfokus pada optimalisasi letak geografis strategis Indonesia sebagai negara maritim. Kebijakan ini dikenal sebagai *Global Maritime Fulcrum* (GMF), yang menekankan pentingnya pemanfaatan potensi kelautan Indonesia untuk memperluas kerja sama dan inisiatif maritim melalui diplomasi maritim (Montratama, 2016, p. 38). Dengan pendekatan ini, kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi lebih menitikberatkan pada pemanfaatan karakter maritim negara sebagai keunggulan strategis. Tujuannya adalah menempatkan Indonesia sebagai aktor utama dan paling berpengaruh di kawasan.

Visi utama dari GMF adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan peran strategis Indonesia dalam diskursus politik dan ekonomi global, terutama dalam menghadapi pergeseran kekuatan geopolitik dan ekonomi dari Barat ke Asia. Dengan memanfaatkan posisi geografis yang strategis dan potensi maritim yang besar, Indonesia berupaya memperkuat perannya sebagai pemimpin regional di kawasan Indo-Pasifik. Meskipun GMF dirancang sebagai strategi besar untuk memperkuat posisi maritim Indonesia, implementasinya di lapangan tidak sepenuhnya berjalan mulus. Beberapa tantangan muncul dalam pelaksanaannya, baik dari segi koordinasi kebijakan maupun konsistensi arah pembangunan maritim. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep dan realisasi, yang perlu diperhatikan lebih lanjut.

a) Hambatan Implementasi dan Tumpang Tindih Kewenangan

Salah satu permasalahan utama adalah adanya tumpang tindih kewenangan antar-lembaga yang terlibat di sektor maritim. Minimnya sistem koordinasi yang terpadu dan berkelanjutan menyebabkan implementasinya kurang efektif. Seperti yang disampaikan (Montratama, 2016, pp. 38-39), pembagian tugas antara Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), TNI Angkatan Laut, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih belum jelas, sehingga memperlemah pengawasan pemerintah terhadap stabilitas maritim serta meningkatkan potensi konflik kewenangan dalam pengelolaan wilayah laut. Selain itu, perubahan arah kebijakan politik turut menyebabkan *Global Maritime Fulcrum* kehilangan arah dan konsistensi.

Visi *Global Maritime Fulcrum* (GMF) Presiden Joko Widodo yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat maritim global mengalami kegagalan yang merusak ambisinya dan menunjukkan kekeliruan, sehingga berpotensi mengurangi kredibilitasnya di tingkat domestik dan ASEAN. Kegagalan utama berasal dari kurangnya koordinasi institusional, dengan tumpang tindih wewenang antara lembaga seperti TNI-AL, BAKAMLA, dan Kementerian Kelautan yang menyebabkan inefisiensi dalam kebijakan maritim, seperti pengendalian penangkapan ikan ilegal atau pengamanan jalur laut penting. Selain itu, GMF terhambat oleh prioritas pada pembangunan infrastruktur darat, dengan investasi minim untuk modernisasi angkatan laut dan pelabuhan, membatasi Indonesia memanfaatkan wilayah perairan seluas untuk proyeksi global.

Agar GMF dapat menjadi strategi yang efektif, terdapat beberapa langkah penting yang perlu dilakukan. Pertama, Indonesia perlu meningkatkan *role performance*-nya melalui diplomasi aktif di berbagai forum ASEAN dan forum maritim kawasan lainnya. Kehadiran yang konsisten dan inisiatif strategis di forum-forum tersebut akan memperkuat citra Indonesia

sebagai aktor regional yang kredibel dan berkomitmen terhadap tata kelola maritim yang stabil dan inklusif. Kedua, perlu ada upaya memperkuat koherensi institusional di tingkat domestik, khususnya dalam hal koordinasi antara lembaga-lembaga maritim seperti BAKAMLA, TNI AL, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tanpa konsistensi dan sinergi kebijakan, visi GMF akan tetap bersifat simbolik dan sulit diwujudkan secara fungsional. Ketiga, Indonesia perlu membangun peran baru sebagai *regional maritime non-entrepreneur*, yaitu negara yang tidak hanya mengejar kepentingan ekonomi atau komersial, tetapi berperan sebagai penjamin tata kelola maritim regional yang adil dan berkelanjutan. Peran ini akan memperkuat legitimasi normatif Indonesia di ASEAN, sekaligus membedakan pendekatan Indonesia dari strategi maritim kekuatan besar yang cenderung hegemonik. Dengan demikian, GMF harus dikembangkan bukan hanya sebagai proyek domestik, melainkan juga sebagai instrumen diplomasi peran yang memproyeksikan identitas Indonesia sebagai penjaga stabilitas kawasan dan pemimpin maritim yang bertanggung jawab.

Diplomasi Maritim Indonesia di Forum Regional

Berbagai forum dan pertemuan rutin telah dibentuk sebagai respons terhadap tantangan keamanan maritim, mulai dari kelompok kerja hingga pertemuan tingkat tinggi antarpejabat senior (SOM), serta pertemuan para menteri dan konferensi tingkat tinggi (KTT) yang dilaksanakan setiap tahun. Agenda tersebut mencakup Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM), Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN (ADMM), Pertemuan Menteri Hukum ASEAN (ALAWMM), serta Pertemuan Menteri ASEAN untuk Penanganan Kejahatan Transnasional (AMMTC), hingga KTT ASEAN.

Dikarenakan banyaknya forum yang dibentuk, dan untuk mencegah forum yang tumpang-tindih, akhirnya dibentuklah *ASEAN Maritime Forum*. Forum ini dibentuk pada 2010 sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antarnegara anggota ASEAN dalam menghadapi tantangan keamanan maritim, mendorong pembangunan berkelanjutan, dan menjamin kebebasan navigasi di perairan strategis kawasan. AMF secara khusus berfungsi sebagai platform informal untuk mempertemukan aktor-aktor pemerintah dari berbagai sektor, termasuk pertahanan, transportasi, lingkungan, dan energi guna membahas isu-isu sektoral yang berkaitan dengan laut.

Inisiatif Pencegahan IUU Fishing

Demi meningkatkan proteksi terhadap keamanan maritim, terutama dalam hal menjaga ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya hayati, Indonesia, ketika menjadi tuan rumah *ASEAN Maritime Forum* (AMF) ke-6 dan *Expanded ASEAN Maritime Forum* (EAMF) ke-4

mengusulkan pembaruan regulasi regional terkait penanganan praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*IUU Fishing*). Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam memerangi *IUU Fishing*, bahkan mendorong agar praktik ini dikategorikan sebagai kejahatan transnasional dalam pertemuan ASEAN dengan Uni Eropa. Selain itu, Indonesia juga memprakarsai pembuatan Panduan Pencegahan *IUU Fishing* di tingkat menteri ASEAN. Keaktifan Indonesia dalam menjembatani serta menginisiasi setiap perjanjian menunjukkan peran penting yang dimiliki negara ini baik di tingkat regional maupun global.

Harapannya, pencapaian yang telah diraih ini akan terus mengalami perkembangan yang positif dan mampu beradaptasi secara dinamis terhadap perubahan situasi global maupun regional, dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional sebagai prioritas utama. Dalam prosesnya, Indonesia juga diharapkan tetap berkomitmen terhadap peran aktifnya dalam menjaga stabilitas, perdamaian, dan keamanan internasional. Perjanjian bilateral yang dibentuk oleh Indonesia bukan hanya memberikan dampak langsung kepada negara-negara yang menjadi pihak dalam kesepakatan tersebut, tetapi juga memiliki kontribusi strategis dalam menciptakan sinergi kebijakan antarnegara, khususnya dalam memperkuat sistem perlindungan dan pengawasan terhadap keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Pada tahun 2015, Indonesia tampil sebagai negara yang mendorong implementasi *East Asia Summit (EAS) Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation*. Selain itu, Indonesia juga berperan sebagai penggagas pembentukan *ASEAN Seaport on Counter Interdiction Task Force (ASITF)*. Sebagai bentuk konkret dari inisiatif ASITF, Indonesia menetapkan pelabuhan sebagai titik perbatasan strategis dalam pengawasan peredaran narkoba dan prekursor narkoba, di samping bandara. Dalam konteks peningkatan konektivitas antarnegara ASEAN, Indonesia bersama Filipina berhasil mencapai kesepakatan penting setelah proses negosiasi intensif selama lima tahun terakhir. Kesepakatan tersebut kemudian diperkuat melalui Deklarasi Manila pada tahun 2017.

a) Peran Indonesia dalam Mendorong Kerjasama Maritim Regional

Guna memperkuat pendekatan multilateral dalam menjaga stabilitas kawasan, Indonesia tidak hanya berfokus pada isu *IUU Fishing* melalui *ASEAN Maritime Forum*, tetapi juga aktif mendorong kerja sama maritim di berbagai platform regional lainnya. Salah satu contohnya adalah keterlibatan Indonesia dalam Konferensi *4th East Asia Summit (EAS) on Maritime Security Cooperation*. (Farhana, 2022, pp. 80-92) menjelaskan bahwa Indonesia memanfaatkan forum seperti *East Asia Summit* sebagai sarana untuk memperkuat kerja sama maritim, sekaligus menegaskan posisinya dalam membentuk dan mengarahkan agenda

keamanan maritim di kawasan. Indonesia menyoroti pentingnya memperkuat kolaborasi maritim dengan berfokus pada empat isu utama, yakni: keamanan maritim, keselamatan di laut, peralihan menuju *Blue Economy* di tingkat regional, serta inisiatif Indo-Pasifik Ocean, termasuk dukungan India dalam memperkaya arsitektur maritim kawasan Indo-Pasifik.

Kebijakan luar negeri Indonesia berperan penting dalam mempererat hubungan dengan sesama negara anggota ASEAN, sehingga mendorong peningkatan kerja sama regional. Dalam konteks ini, Indonesia kerap mengambil posisi sebagai pemimpin informal yang berperan memfasilitasi dialog, mendorong berbagai inisiatif keamanan, serta bertindak sebagai penengah dalam konflik kawasan. Peran tersebut mencerminkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas kawasan dan penguatan hubungan antarnegara di Asia Tenggara. Partisipasi Indonesia juga terlihat melalui pemanfaatan forum internasional seperti *East Asia Summit* untuk mendorong kerja sama maritim. Hal ini memperlihatkan upaya aktif Indonesia dalam membentuk arah agenda keamanan maritim kawasan, serta menegaskan peran kepemimpinannya dalam mendorong diskusi dan inisiatif keamanan regional.

Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan

Komitmen tersebut juga sejalan dengan peran strategis Indonesia dalam dinamika Laut Cina Selatan, khususnya melalui kontribusinya dalam penyusunan *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DoC), yang menjadi tonggak penting dalam upaya menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Indonesia telah memainkan peran strategis sebagai penyeimbang netral dalam dinamika keamanan maritim Asia Tenggara, khususnya dalam sengketa Laut Cina Selatan. Indonesia juga berperan penting dalam proses penyusunan *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DoC) yang ditandatangani pada tahun 2002 di Bangkok.

Sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2011, Indonesia berhasil mendorong adopsi *Guidelines for the Implementation of the DoC*, yang membuka jalan bagi pembentukan *Code of Conduct* (CoC) yang lebih komprehensif. Komitmen Indonesia terhadap penyelesaian damai sengketa Laut Cina Selatan terus berlanjut dengan memimpin negosiasi CoC. Pada tahun 2017, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan yang menghasilkan kerangka awal CoC di Bali. Sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2023, Indonesia mempercepat proses negosiasi dengan mengusulkan panduan kerja yang disepakati oleh semua anggota ASEAN dan Tiongkok, dengan tujuan menyelesaikan CoC dalam tiga tahun. Peran aktif Indonesia dalam inisiatif-inisiatif ini menunjukkan komitmennya untuk menjaga stabilitas dan keamanan maritim di kawasan, serta memperkuat posisi ASEAN dalam menghadapi tantangan geopolitik di Laut Cina Selatan.

Lebih lanjut, Indonesia memiliki peran strategis sebagai penyeimbang netral, meskipun Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Kepulauan Natuna tumpang tindih dengan klaim Tiongkok. Netralitas Indonesia, yang sejalan dengan kebijakan luar negeri bebas dan aktif, memungkinkannya untuk memfasilitasi dialog tanpa memihak pada Amerika Serikat atau Tiongkok, dua kekuatan besar yang bersaing di kawasan Indo-Pasifik. Peran Netralitas Indonesia dalam Dinamika Amerika Serikat-Tiongkok merupakan bagian krusial dari peran strategisnya dalam kerja sama maritim ASEAN, sebagaimana dianalisis melalui lensa teori peran.

Netralitas Indonesia memiliki dampak strategis yang signifikan terhadap stabilitas kawasan ASEAN. Pertama, dengan memimpin inisiatif seperti DoC dan CoC, Indonesia memperkuat sentralitas ASEAN sebagai platform utama untuk mengelola konflik maritim. Ini penting di tengah rivalitas AS-Tiongkok, di mana ASEAN berisiko terpecah karena perbedaan kepentingan anggota, seperti Filipina yang condong ke AS atau negara-negara yang lebih dekat dengan Tiongkok. Kedua, netralitas Indonesia mencegah eskalasi konflik dengan mempromosikan dialog multilateral. Misalnya, keberhasilan Indonesia dalam mendorong kerangka CoC pada 2017 dan panduan kerja pada 2023 menunjukkan kemampuannya untuk menjembatani kepentingan Tiongkok dan ASEAN tanpa memicu konfrontasi dengan AS.

Dampak Strategis Peran Indonesia terhadap Stabilitas Kawasan

Kerja sama maritim Indonesia memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas kawasan ASEAN. Melalui diplomasi aktif dan inisiatif-inisiatif strategis, Indonesia berperan sebagai penyeimbang netral dalam dinamika keamanan maritim Asia Tenggara. Kontribusi Indonesia dalam penyusunan *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DoC) dan upaya mendorong adopsi *Guidelines for the Implementation of the DoC* menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Selain itu, Indonesia juga memimpin negosiasi *Code of Conduct* (CoC) yang lebih komprehensif, termasuk menjadi tuan rumah pertemuan yang menghasilkan kerangka awal CoC di Bali pada tahun 2017. Sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2023, Indonesia mempercepat proses negosiasi dengan mengusulkan panduan kerja yang disepakati oleh semua anggota ASEAN dan Tiongkok, dengan tujuan menyelesaikan CoC dalam tiga tahun. Peran aktif Indonesia dalam inisiatif-inisiatif ini menunjukkan komitmennya untuk menjaga stabilitas dan keamanan maritim di kawasan, serta memperkuat posisi ASEAN dalam menghadapi tantangan geopolitik di Laut Cina Selatan.

Dalam upaya memerangi IUU *Fishing*, Indonesia mengusulkan agar praktik tersebut dikategorikan sebagai kejahatan transnasional dalam forum ASEAN-Uni Eropa. Selain itu, Indonesia memprakarsai panduan pencegahan IUU Fishing di tingkat menteri ASEAN, memperkuat kerja sama regional dalam menjaga keamanan maritim dan keberlanjutan sumber daya laut. Langkah ini menunjukkan pendekatan Indonesia yang mengintegrasikan aspek keamanan dan lingkungan dalam diplomasi maritimnya. Indonesia juga memainkan peran sebagai penyeimbang netral dalam dinamika geopolitik kawasan, menjaga posisi sentral ASEAN di tengah persaingan antara kekuatan besar. Dengan tidak berpihak pada blok tertentu, Indonesia mampu menjembatani kepentingan berbagai pihak, mendorong dialog konstruktif, dan menghindari eskalasi konflik di kawasan. Pendekatan ini memperkuat posisi ASEAN sebagai aktor utama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara.

Melalui diplomasi yang konsisten dan proaktif, Indonesia telah memperkuat kerangka kerja sama regional, meningkatkan kepercayaan antarnegara anggota, dan memperkuat posisi ASEAN dalam menghadapi tantangan keamanan maritim bersama. Inisiatif-inisiatif yang dipimpin oleh Indonesia tidak hanya memperkuat kerangka kerja sama regional, tetapi juga meningkatkan kepercayaan antarnegara anggota dalam menghadapi tantangan keamanan maritim bersama. Hal ini tercermin dalam berbagai forum dan latihan bersama yang difasilitasi Indonesia, yang menekankan pentingnya solidaritas dan respons kolektif terhadap isu-isu maritim di kawasan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Ketika lanskap keamanan maritim regional semakin diwarnai oleh berbagai macam krisis dan hambatan, peran Indonesia utamanya dalam konteks keamanan maritim ASEAN harus mampu bertransmigrasi atau melakukan reposisi dari aktor inisiator menjadi arsitek integrator kawasan. Artinya, Indonesia bukan lagi hanya sekadar pengusul kerjasama maupun fasilitator dialog, melainkan menjadi negara yang aktif merancang dan menyatukan berbagai macam instrumen kebijakan keamanan laut ASEAN dalam bentuk tata kelola regional terpadu. Reposisi tersebut dapat mengukuhkan struktur kepemimpinan Indonesia.

Hal tersebut juga dapat menegaskan bahwa peran Indonesia dalam ASEAN tidak cukup hanya ditopang oleh keunggulan geografis maupun netralitas politik, tetapi juga oleh kapasitas Indonesia dalam merumuskan agenda maritim regional yang kohesif dan berbasis kepentingan bersama. Kemudian, salah satu kelemahan yang kerap muncul dalam kebijakan luar negeri Indonesia dalam sektor maritim merupakan dominasi dari pendekatan secara simbolik. Sebagai contohnya, jargon “Poros Maritim Dunia” yang kuat secara naratif politik namun lemah dalam implementasi, penerapan serta konsistensinya.

DAFTAR REFERENSI

- Auliya, P., & Sulaiman, Y. (2019). Indonesia, ASEAN centrality and global maritime fulcrum. *Jurnal Global & Strategis*, 80.
- Bradford, L. J. (2005). The growing prospects for maritime security cooperation in Southeast Asia. *Naval War College Review*.
- Bueger, C. (2015). What is maritime security? *Marine Policy*, 53, 159–164.
- Farhana. (2022). Indonesia's maritime diplomacy in ASEAN: An international vision in the face of national challenges. In *ASEAN Maritime Security* (pp. 80–92).
- Febrica, S. (2017). *Maritime security and Indonesia*. London: Routledge.
- Guricci, M. F., & Seniwati. (2024). Strategi keamanan maritim di Asia Tenggara: Kerjasama diplomasi maritim di ASEAN. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 130–139.
- Hadiningrat, J. K. (2020). Diplomasi maritim: Meletakkan fondasi poros maritim dunia. *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesia Maritime Journal)*, 105.
- Hong, L. Q. (2021). The effect of maritime cluster on port production efficiency. *Maritime Policy & Management*, 61–74.
- Ishiyama, J., et al. (2021). Rethinking the undergraduate political science major: An introduction to the symposium. *PS: Political Science & Politics*, 53(2), 353–357.
- Kusuma, A., et al. (2021). Relevansi strategi pertahanan laut berdasarkan doktrin Jalesveva Jayamahe terhadap globalisasi dan perkembangan lingkungan strategis. *Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut*, 77–100.
- Montratama, I. (2016). The reconstruction of Indonesia foreign policy amidst the 21st century strategic circumstances dynamics in Indo-Pacific. *Intermestic Journal of International Studies*, 38.
- Octavian, A. J. (2020). Designing intelligent coastal surveillance based on big maritime data. In *2020 International Workshop on Big Data and Information Security (IWBIS)* (pp. 1–8). <https://doi.org/10.1109/IWBIS50925.2020.9255491>
- Parks, P. (2023). Story circles: A new method of narrative research. *American Journal of Qualitative Research*, 58–60.
- Pratiwi, I. F., Puspitasari, I., Hikmawati, I., & Bagus, H. (2021). Global Maritime Fulcrum: Indonesia's middle power strategy between Belt and Road Initiatives (BRI) and Free-Open Indo Pacific (FOIP). *Central European Journal of International and Security Studies*, 30–54.

- Reza, B. (2023). Analisis perbandingan politik, ekonomi, teknologi, pertahanan dan keamanan dan sistem pemerintahan dua negara Indonesia dan Singapura. *Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*, 2.
- Ridho, M., & Pratama, A. (2020). Signifikansi keamanan maritim di ASEAN. *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 165–175.
- Zhao, T.-T., Feng, Y.-J., Doanh, P. N., Sayasone, S., Khieu, V., Nithikathkul, C., ... Lai, Y.-S. (2021). Model-based spatial temporal mapping of opisthorchiasis in endemic countries of Southeast Asia. *Epidemiology and Global Health*, 1–21.